

PERAN PENYULUH KEHUTANAN DAN PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENDAMPINGAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)

Dyah Ekaprasetya Manggala Rimbawati, SHut, MSi
Penyuluh Kehutanan Ahli Muda - Pusat Penyuluhan, BP2SDM, KLHK

Sosialisasi Peran Penyuluh Kehutanan dan Penyuluh Lingkungan Hidup dalam Pendampingan Program Kampung Iklim ini merupakan kali pertama dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Hari Jumat tanggal 22 April 2022 secara virtual melalui *zoom cloud meeting* dan *live streaming youtube* Pusat Penyuluhan. Acara ini atas kerjasama Pusat Penyuluhan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) KLHK dan Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI).

Acara Sosialisasi ini berlangsung selama kurang lebih 4 jam diawali dengan pengantar oleh Plt. Kepala BP2SDM Drs. Ade Palguna dan Dirjen PPI Ir. Laksmi Dhewanthi, MA. Narasumber acara ini Plt. Kepala Pusat Penyuluhan Dr. Ir. Kusdamayanti, MSi, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Dra. Sri Tantri A, MSC, Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Koko Wijanarko, SHut dan Cut Salwitry Tray, SSos serta Penyuluh Kehutanan Pendamping Kampung Iklim Welahan Sulistiyanto, SST dengan moderator Tim Teknis Proklim M.Kundarto, SP, MP.

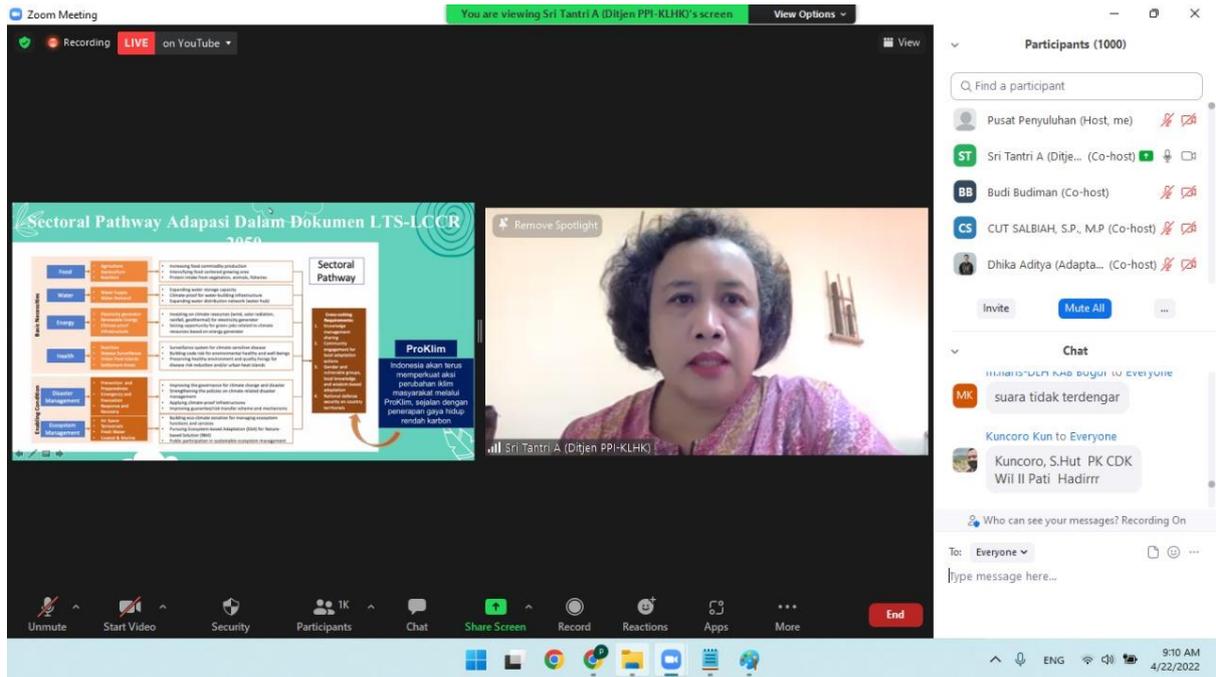
Plt. Kepala BP2SDM yang diwakili oleh Plt. Kepala Pusat Penyuluhan dalam sambutannya bahwa berdasarkan hasil survey Pusat Penyuluhan Tahun 2022 terhadap Program Pembangunan LHK yang didampingi Penyuluh Kehutanan di daerah diantaranya Perhutanan Sosial, Rehabilitasi DAS, Rehabilitasi Mangrove, Pengembangan Ekowisata, Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha, Kemitraan Konservasi dan Program Kampung Iklim. Diharapkan agar Penyuluh Kehutanan dapat berperan aktif dalam mendukung dan mensukseskan Proklim melalui pendampingan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) binaanya sesuai kondisi di lokasi. Melalui pendampingan tersebut diharapkan akan terwujud KTH yang produktif, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan sebagai cikal bakal masyarakat pelaksana Proklim.



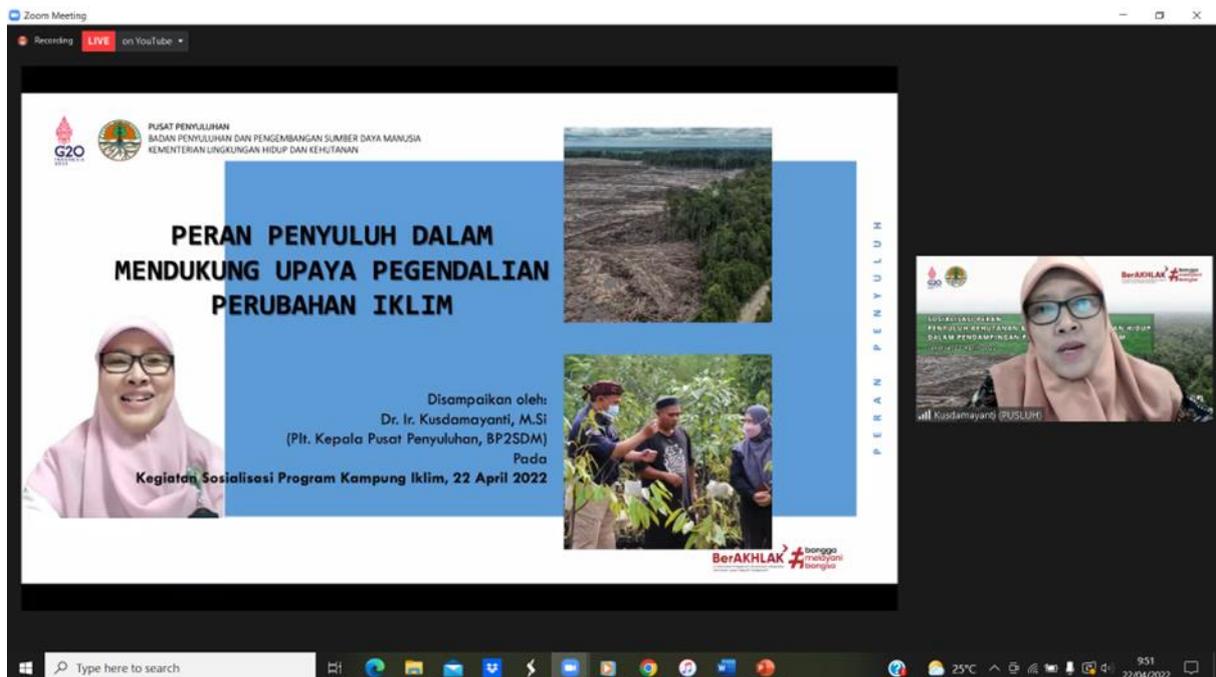
Dirjen PPI dalam sambutannya menyampaikan bahwa komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim melalui strategi 3 ketahanan terhadap perubahan iklim yaitu 1) ketahanan ekonomi, 2) ketahanan sosial dan sumber kehidupan, 3) ketahanan ekosistem dan lanskap. Indonesia tidak hanya berkomitmen hingga tahun 2030 melainkan mempunyai visi jangka panjang sampai dengan tahun 2050. Hasil penelitian perhitungan tingkat sensitifitas perubahan iklim tahun 2016 berada pada tingkat sedang atau belum optimal mengantarkan masyarakat mengerti perubahan iklim, prosesnya, dampaknya dan apa yang dilakukannya. Sehingga diperlukan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Peran Penyuluh Kehutanan dan Penyuluh Lingkungan Hidup sangat strategis dalam mengubah pengetahuan, sikap dan keterampilan sasaran sulu yaitu pelaku utama masyarakat maupun kelompok masyarakat khususnya mengenai mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak.



Direktur Adaptasi Perubahan Iklim memaparkan materi tentang “Kebijakan Indonesia dalam Perubahan Iklim”. Bu Tantri menyampaikan bahwa sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi, Indonesia berkomitmen untuk menggerakkan potensi masyarakat dalam menangani perubahan iklim melalui Proklamasi dengan target 20.000 kampung iklim sampai dengan tahun 2024. Dalam rangka mencapai target tersebut, efektivitas penyelenggaraan Proklamasi perlu terus diperkuat dan ditingkatkan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang berketahanan iklim dan menerapkan pola hidup rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Perubahan iklim mempunyai dampak yang luar biasa, kegiatan Proklamasi merupakan penguatan aksi lokal pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak, Penyuluh Kehutanan menempati peran strategis karena masyarakat bisa mengetahui apa yang bisa dilakukan masyarakat dengan perubahan iklim ini.



Plt. Kepala Pusat Penyuluhan memaparkan materi tentang Peran Penyuluh dalam Mendukung Upaya Pengendalian Perubahan Iklim. Ibu Ida menyampaikan bahwa pendampingan Proklim dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan PNS, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS) terhadap KTH melalui 3 kelola yaitu Kelola kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola usaha. Berdasar data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (SIMLUH), Pusat Penyuluhan telah membina Penyuluh Kehutanan PNS sejumlah 2.907 orang, PKSM 6.125 orang dan PKS sejumlah 1.009 orang. Dimana Penyuluh tersebut mendampingi KTH yang tersebar di seluruh Indonesia sejumlah 27.960 KTH dengan kelas pemula 25.677 KTH, kelas madya 2,170 KTH dan kelas utama 113 KTH.



Sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 73 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan PERMEN LHK Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan bahwa Peran Penyuluh Kehutanan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan di wilayah kerjanya yaitu: 1) Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi petani dalam mengelola usaha; 2) Memfasilitasi proses pembelajaran petani/KTH dalam menerapkan tata kelola usaha yang baik dan berkelanjutan; 3) Membantu petani/KTH/Kelompok masyarakat dalam menumbuhkembangkan kelembagaannya agar dapat berdaya saing dan produktif; 4) Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan petani/KTH/kelompok masyarakat; 5) Mengupayakan akses petani ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya dalam pengembangan usaha, dan pendampingan serta pengawalan petani dalam meningkatkan produksi dan produktivitas; 6) Penyuluh Kehutanan sebagai pengaman aset negara berupa hutan yaitu mengajak masyarakat agar tahu, mau dan mampu ikut memelihara, mempertahankan serta melindungi sumber daya hutan dari berbagai gangguan keamanan hutan (kebakaran, penebangan liar dan perambahan hutan).

PEH Koko Wijanarko, SHut menyampaikan materi tentang mengapa harus didorong Proklim, apa itu Proklim, apa saja komponen proklim dan contoh aksi. Proklim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh KLHK dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk meningkatkan ketahanan iklim, menurunkan emisi atau meningkatkan serapan GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Adapun kategori Proklim yaitu proklim pratama, proklim madya, proklim utama dan proklim lestari. Pada Proklim kelembagaan mempunyai poin yang sangat besar. Aktivitas mudah dibangun tetapi membangun kelembagaan yang solid di masyarakat sulit, peran Penyuluh Kehutanan disini dibutuhkan.



PEH Cut Salwity Tray, SSos menyampaikan materi tentang Tata Cara Registrasi Proklim. Proklim merupakan salah satu program pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak yang perlu dilaporkan dan dicatatkan dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). Dimana tujuan dari SRN yaitu : 1) Pendataan : Pendataan aksi dan sumber daya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia, 2) Informasi publik : Penyediaan data dan informasi kepada publik tentang aksi dan sumber daya adaptasi dan mitigasi serta capaiannya, 3) Kontribusi para pihak : Pengakuan pemerintah atas kontribusi berbagai pihak terhadap upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia, 4) *Clarity, transparency, understanding* : Menghindari penghitungan ganda terhadap aksi dan sumber daya adaptasi dan mitigasi sebagai bagian pelaksanaan prinsip *Clarity, transparency, understanding*.

Narasumber terakhir, Penyuluh Kehutanan Pendamping Kampung Iklim Welahan membagikan pengalaman keberhasilannya dalam mendampingi Proklim. Pak Sulistiyanto, SST merupakan Penyuluh Kehutanan Madya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII. Pengalaman pendampingan Kampung Iklim Welahan penguatan aksi PPI di tingkat tapak dilakukan meliputi : 1) Metode dan teknik pendampingan melalui diskusi, temu lapang, pengisian SRN dan Spectrum, 2) Observasi lapangan dengan identifikasi potensi wilayahnya dari sisi kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha, 3) Strategi pendampingan dengan melakukan pendampingan terhadap KTH binaan, 4) Tantangannya yaitu mengembangkan jejaring kerja, pendampingan Penyuluh Kehutanan secara kolaboratif di lapangan, 5) Peluangnya yaitu mengangkat isu lingkungan dengan output berdampak pada kelestarian alam dan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan penyerapan tenaga kerja.



Sulistiyanto mendampingi 4 KTH dalam kegiatan Proklim yaitu KTH Gemah Ripah, KTH Buana Hijau, KWT Srikandi dan KTH Srikandi. KTH Gemah Ripah merupakan KTH awal yang didampingi pada tahun 1999-2022, kemudian KTH Buana Hijau 2010-2022, KWT Srikandi 2016-2022 dan KTH Srikandi 2017-2022. Dimana kelola kawasan Proklim Welahan adalah agroforestry. Kegiatan agroforestry berdampak optimal dan maksimal dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim antara lain mata air secara kontinu, hasil hutan bukan kayu (HHBK) lebah madu, tanaman bawah tegakan tanaman pangan yaitu jagung dan palawija, bank sampah, kegiatan pertemuan di gubug kerja, kolam ikan, kompos, kayu bakar dan log, edukasi lingkungan, limbah kayu untuk HHBK jamur, dan ekowisata. Pesan Sulistiyanto di akhir materinya yaitu : Penyuluh kehutanan harkat dan martabatnya, bekerja keras sesuai tupoksi dalam mengawal kegiatan KTH di dalam dan di luar kawasan hutan agar selalu berbuat terbaik bagi masyarakat.

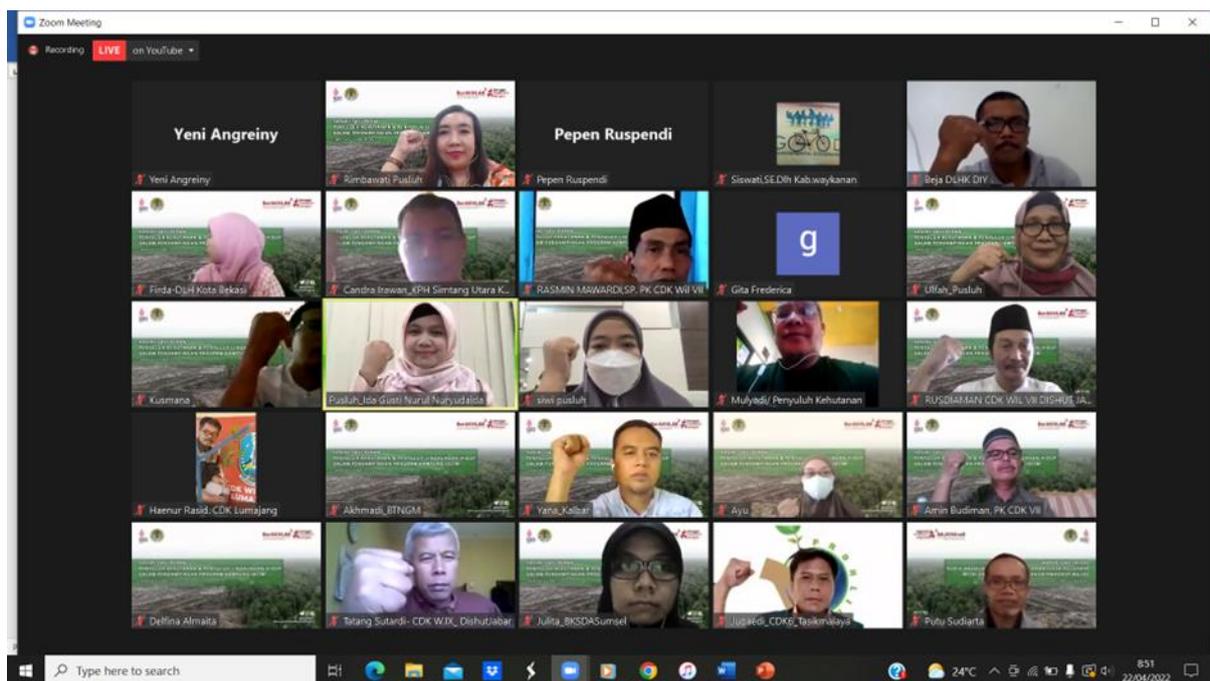
Plt. Kepala Pusat Penyuluhan dalam diskusi menyampaikan bahwa Proklim bisa didorong untuk kelompok mana saja, baik KTH Hutan Rakyat, KTH skema perhutanan sosial maupun KTH binaan Penyuluh Kehutanan UPT KLHK. Kelas KTH baik pemula, madya maupun utama bisa menjadi pelaksana Proklim. KTH yang teregister di Dinas Provinsi nanti akan mudah dalam pengelolaan/pembinaan KTH

dan sebagai database kegiatan dari sisi kelembagaan pada aplikasi SIMLUH. Sertifikasi sebagai Penyuluh pendamping Proklam dari sisi teknis yaitu dengan mengumpulkan sertifikat webinar sosialisasi ini. Adapun tindak lanjut kegiatan sosialisasi ini adalah akan dilaksanakan Bimbingan Teknis menjadi beberapa Region.

Pada diskusi disampaikan pula oleh Koko dan Cut bahwa terkait syarat Proklam yaitu apabila terdapat kelompok dengan kegiatan mitigasi dan perubahan iklim serta ada kelembagaan di tingkat tapak yang bisa mengawal kegiatan mitigasi perubahan iklim bisa diusulkan untuk didaftarkan dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). Dari sisi angka kredit dalam mendampingi Proklam, Sulistiyanto menyampaikan bahwa sesuai Permen LHK RI Nomor : 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan terdapat angka kredit dalam pendampingan Proklam sebagai contoh pada pembentukan KTH dan pengembangan kemandirian sasaran.

Di akhir diskusi Bu Tantri menyampaikan bahwa Penyuluh berperan sangat penting sebagai penggerak, memberikan pemahaman, mengubah pemikiran serta mempunyai cara mumpuni menghadapi masyarakat dalam melakukan upaya melindungi hutan dan memperbaiki lingkungan.

Bu Ida juga menyampaikan bahwa Penyuluhan bidang kehutanan dan lingkungan hidup adalah satu kesatuan yang utuh, sama halnya kegiatan beririsan yang pada ujungnya mewujudkan hutan lestari, lingkungan hidup yang lebih baik dan masyarakat sejahtera.



Acara sosialisasi ditutup pantun oleh MC :

- Panas-panas enak makan es krim..
- Lebih enak lagi ditambah puding..
- Mari bersama sukseskan Proklam..
- Untuk hutan lestari dan mencegah *global warming*..

=====R=====